

# PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

"Penulisan buku yang berjudul "Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik" ini, merupakan langkah strategis dan tepat waktu dalam merespons dinamika geopolitik dan geoekonomi yang tengah berubah cepat di kawasan Asia dan Pasifik. Dengan pendekatan yang kritis, empiris, dan multidisipliner, buku ini berupaya membahas langkah strategis dalam menghadapi era pergeseran kekuatan global ke kawasan Timur. Buku yang disusun oleh *Paramadina Asia and Pacific Institute (PAPI)* ini adalah hasil dari forum kajian yang diharapkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berdampak dalam ranah kebijakan luar negeri."

**Prof. Didik J Rachbini, Ph.D.**  
(Rektor Universitas Paramadina)

"Sebagai sebuah negara adi daya baru, Tiongkok memainkan peran yang sangat penting dalam peta hubungan internasional kontemporer. Di kawasan Asia Pasifik, peran Tiongkok mencakup beragam dimensi yang saling berkelindan. Oleh karenanya, buku ini patut dibaca oleh para penstudi Hubungan Internasional di Indonesia untuk memahami pola hubungan bilateral Tiongkok dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam bidang ekonomi dan pola interaksi strategis Tiongkok di kawasan yang sangat dinamis ini"

**Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.**  
(Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia)

"Menyikapi kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok sebagai negara terkemuka di Asia Tenggara, Indonesia perlu mencermati kerja sama bilateralnya dengan negara itu. Ada peluang tapi juga banyak tantangan. Selain itu ada kompetisi juga dengan sesama negara-negara ASEAN dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi dan keamanan. Buku ini membantu pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi peluang dan tantangan itu secara kreatif tanpa mengkompromikan martabat dan kedaulatan Indonesia. Hubungan dan kerja sama yang mendalam dengan Tiongkok memerlukan kecerdasan dan kreativitas diplomasi berbasis informasi dan analisis yang akurat dan kredibel. Buku ini memberi kontribusi untuk diplomasi semacam itu"

**Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.**  
(Guru Besar Politik Internasional, Universitas Pelita Harapan)



INDONESIA EMAS GROUP  
Jalan Pasir Putih, No.16, Kota Bandung  
Kontak: 082-188-188-540  
E-Mail: indonesiaemasgroup5758@gmail.com



PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL  
TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA  
DI ASIA DAN PASIFIK

Peni Hanggarini | Mishka Husen Balfas | Emil Radhiansyah |  
Hizra Marisa | Bagas Rizky Ramadhan | Alia Rahmatulummah |  
Rizki Damayanti | Ratih Ariefianti Soeroto | Suhayatmi

# PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

Editor:  
Peni Hanggarini



Peni Hanggarini  
Mishka Husen Balfas  
Emil Radhiansyah  
Hizra Marisa  
Bagas Rizky Ramadhan  
Alia Rahmatulummah  
Rizki Damayanti  
Ratih Ariefianti Soeroto  
Suhayatmi

Peni Hanggarini  
Mishka Husen Balfas  
Emil Radhiansyah  
Hizra Marisa  
Bagas Rizky Ramadhan  
Alia Rahmatulummah  
Rizki Damayanti  
Ratih Ariefianti Soeroto  
Suhayatmi

# PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

Editor:  
Peni Hanggarini

**PENGANTAR STUDI  
HUBUNGAN BILATERAL  
TIONGKOK  
DENGAN NEGARA-NEGARA  
DI ASIA DAN PASIFIK**

---

## **Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

Peni Hanggarini | Mishka Husen Balfas | Emil Radhiansyah |  
Hizra Marisa | Bagas Rizky Ramadhan | Alia Rahmatulummah |  
Rizki Damayanti | Ratih Ariefianti Soeroto | Suhayatmi

# PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

Editor: Peni Hanggarini



# PENGANTAR STUDI HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA DAN PASIFIK

## ISBN

978-634-7311-08-5

## Penulis

Peni Hanggarini | Mishka Husen Balfas | Emil Radhiansyah | Hizra Marisa |  
Bagas Rizky Ramadhan | Alia Rahmatulummah | Rizki Damayanti |  
Ratih Ariefianti Soeroto | Suhayatmi

## Editor

Peni Hanggarini

## Cover

Tim Penerbit Indonesia Emas Group

## Tata Letak

Shofian Rahmat



## PENERBIT

INDONESIA EMAS GROUP

Jalan Pasir Putih, No 16 Kota Bandung

Kontak 082-188-188-540

E-mail: [penerbitieg@gmail.com](mailto:penerbitieg@gmail.com)

Cetakan Pertama, Juli 2025

i-x+226 hlm., 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

*All Rights Reserved*

# Daftar Isi

Kata Pengantar dari Rektor Universitas Paramadina.....	v
Kata Pengantar dari Editor.....	vii
Daftar Isi .....	ix

## **BAB 1**

Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia dan Pasifik

<i>Peni Hanggarini</i> .....	1
------------------------------	---

## **BAB 2**

Kerja Sama Ekonomi dan Politik Tiongkok dan Indonesia

<i>Mishka Husen Balfas</i> .....	17
----------------------------------	----

## **BAB 3**

Diplomasi Olahraga: Jembatan Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok

<i>Emil Radhiansyah</i> .....	35
-------------------------------	----

## **BAB 4**

Kerja Sama Tiongkok dan Indonesia Melalui Jalur Sutra Digital: Tantangan dalam Mengembangkan Konektivitas Digital di Indonesia

<i>Hizra Marisa</i> .....	69
---------------------------	----

## **BAB 5**

Langkah Ekonomi Tiongkok di Malaysia: Antara Kepentingan Strategis dan Diplomasi Kawasan

<i>Bagas Rizky Ramadhan &amp; Alia Rahmatulummah</i> .....	95
--	----

## **BAB 6**

Kerja Sama Tiongkok dan Negara-Negara Muslim Asia Selatan: Antara Kepentingan Strategis dan Diplomasi Budaya

<i>Rizki Damayanti</i> .....	119
------------------------------	-----

**BAB 7**

Dampak Hubungan Bilateral Tiongkok dan Jepang Terhadap Program MIC (*Made In China*) 2025

*Ratih Ariefianti Soeroto*..... 145

**BAB 8**

Kebijakan dan Diplomasi Tiongkok terhadap Timor-Leste dalam Memperkuat Pengaruh di Asia Pasifik

*Suhatmi*..... 165

**BAB 9**

Kompleksitas Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Australia dan Negara-negara di Kepulauan Pasifik

*Peni Hanggarini*..... 191

Biodata Penulis ..... 219

# BAB 1

## Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia dan Pasifik

Peni Hanggarini

Tiongkok telah sejak lama menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Khususnya dengan kawasan Asia, interaksi terjadi sejak sekitar abad ke-2 sebelum Masehi atau diperkirakan semakin berkembang pada Masa Dinasti Han hingga Dinasti Tang. Interaksi terwujud dalam perdagangan dimana kota-kota Pelabuhan di Tiongkok menjadi arena berdagang dengan negara-negara atau tepatnya kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, termasuk kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, superioritas Tiongkok terlihat dalam sistem *tributary* (upeti) yang mendorong beberapa negara seperti Jepang, Korea dan negara di Asia Tenggara mengirimkan utusan atau barang sebagai bentuk pengakuan kekuasaan Tiongkok.

Pengaruh Tiongkok terhadap kawasan Asia dan Pasifik masih terlihat hingga saat ini, bahkan tidak hanya dalam aspek perdagangan. Meski telah terjadi berbagai dinamika dalam hubungan internasional, muncul kecenderungan pengaruh Tiongkok akan semakin menguat. Persaingan geopolitik, integrasi ekonomi di era modern serta faktor domestik telah mendorong Tiongkok mengukuhkan pengaruhnya melalui berbagai bentuk kerja sama dan diplomasi ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, digital dan sosial budaya. Diplomasi dilakukan oleh Tiongkok menggunakan *hard power* maupun *soft power* yang juga didukung oleh aktor non-negara.

Posisi geografis Tiongkok yang berada di kawasan Asia dan letaknya yang tidak terlalu jauh dari kawasan Pasifik menunjukkan adanya potensi interaksi yang menarik untuk dikaji. Gambar 1.1. berikut ini menunjukkan posisi Tiongkok yang dekat dengan kawasan Asia dan Pasifik yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Timur

dan Oseania, kawasan yang melingkupi negara-negara yang terletak atau berbatasan dengan Samudera Pasifik khususnya di bagian barat. Negara-negara di kawasan ini sejak pasca Perang Dunia telah mengembangkan diplomasi multilateral untuk mewujudkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan keamanan. Kelembagaan yang terbentuk di kawasan Asia dan Pasifik antara lain adalah *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum* atau ARF, serta pembentukan *East Asia Summit (EAS)*.



Gambar 1.1 Peta Tiongkok, Kawasan Asia dan Pasifik

Sumber: Wikipedia

Dalam perkembangan hubungan internasional, kajian terhadap negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik atau kawasan Asia-Pasifik ini seolah terlupakan ketika konsep *Indo-Pacific* mulai digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada 2018. Bahkan Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN pun turut menanggapi konsekuensi strategis dari konsep *Indo-Pacific* dengan menetapkan konsep *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)*.

Di tengah gencarnya kajian para analis mengenai strategi dan kebijakan *Indo-Pacific* yang memusatkan perhatian pada dampak kompetisi AS dan Tiongkok, sepatutnya kita masih dapat melihat negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik serta kawasan Asia Pasifik sebagai suatu kawasan yang tetap strategis dan berpotensi menciptakan kestabilan. Tiongkok, berupaya menjadi satu-satunya aktor utama yang memberikan pengaruh terhadap pola hubungan yang ada. Namun AS tentu tidak tinggal diam untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya pula di kawasan tersebut.

Pembahasan mengenai pengaruh Tiongkok di negara-negara Asia dan Pasifik dalam buku ini tidak lah bertujuan untuk menyanggah pentingnya konsep *Indo-Pacific* beserta konsekuensi kebijakan turunan ataupun tanggapan dari konsep tersebut. Buku ini justru hadir dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk hubungan yang dijalin Tiongkok dengan beberapa negara di kawasan tersebut. Justru dengan melakukan pembahasan secara mikro atau dengan fokus kepada hubungan bilateral, maka kita dapat mencermati kepentingan nasional Tiongkok sebagai suatu negara besar (*major power*) yang aktif berinteraksi guna menanamkan pengaruhnya. Mitra Tiongkok begitu beragam mulai dari negara maju, berkembang hingga negara kecil yang berada di kawasan Asia dan Pasifik hingga kawasan yang dikenal dengan *Indo-Pacific*. Kepentingan nasional Tiongkok dan mitranya ini seringkali dikemas dalam label kemitraan strategis (*strategic partnership*).

Konsep kemitraan strategis yang seringkali digunakan untuk mengkaji kerja sama keamanan, merupakan suatu bentuk penyelarasan (*alignment*) kepentingan negara-negara. Wujud dari *alignment* dapat dibedakan berdasarkan tingkat formalitas (*formality*) kerja sama, tingkat kedalaman (*depth*) kerja sama dan tingkat keluasan (*scope*) kerja sama. *Alignment* dapat berwujud aliansi (*alliance*) yang didasari oleh perjanjian bersama secara formal, kemitraan strategis (*strategic*

*partnership*) berdasarkan tingkat formalitas yang menengah/ atau sedang melalui penandatanganan kesepakatan, kesepahaman politik informal (*entente*) serta koalisi (*coalition*) berupa kerja sama sementara dan dialog keamanan (*security dialogue*) (Wilkins, 2012).

Meski konsep kerja sama strategis sering digunakan untuk menggambarkan kerja sama antar negara yang harmonis, namun konsep tersebut dikritisi karena dianggap ambigu. Selain itu, konsep kerja sama strategis juga seringkali dianggap hanya sekedar *label diplomatic* karena sebenarnya tidak didasari oleh hubungan yang kuat, hanya untuk meningkatkan citra positif padahal hubungan bilateral masih kurang mendalam. Kerja sama dianggap benar-benar strategis apabila memang memenuhi kepentingan vital yang memiliki orientasi jangka panjang, digunakan untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri agar bertindak bersama di kerja sama atau forum internasional, mencakup berbagai aspek kerja sama secara menyeluruh serta melibatkan koordinasi lintas sektor antara pihak-pihak yang terlibat (Korolev, 2019).

Bentuk kerja sama strategis yang dilakukan Tiongkok dengan mitranya cenderung ke arah yang tidak terlalu mengikat ketat seperti misalnya aliansi. Keputusan Tiongkok ini didasari oleh faktor pertimbangan kelayakan (*feasibility*), kebutuhan (*necessity*), dan fleksibilitas (*flexibility*). Selain itu, ada pertimbangan *cost-benefit* apabila membentuk aliansi di bawah kondisi dunia yang berada dalam hegemoni AS. Menurut Tiongkok, aliansi dipandang tidak perlu karena membebani Tiongkok dengan tanggung jawab dan justru dapat menjadi kontraproduktif. Hal ini terlihat berdasarkan analisa terhadap data kerja sama strategis Tiongkok dengan 109 mitranya dari tahun 1990 sampai 2025, seperti terlihat pada Tabel 1.1. (Zhang, 2025). Beberapa mitra Tiongkok yang tercantum pada tabel tersebut merupakan bagian dari pembahasan buku ini.

Tabel 1.1 Kemitraan Tiongkok

No	Kategori Kemitraan	Negara
1	<i>Comprehensive Strategic Coordinated Partnership</i>	Russia (2019)
2	<i>All-weather strategic cooperative partnership/ all-weather comprehensive strategic partnership/ All-weather strategic partnership</i>	Pakistan (2015); Belarus (2022); Ethiopia (2023); Venezuela (2023); Hungary (2024); Uzbekistan (2024)
3	<i>Comprehensive Strategic Cooperative Partnership</i>	Vietnam (2008); Laos (2009); Cambodia (2010); Myanmar (2011); Thailand (2012); Guinea (2016); Mozambique (2016); Republic of Congo (2016); Senegal (2016); Sierra Leone (2016); Kenya (2017); Namibia (2018); Zimbabwe (2018); Tanzania (2022); DRC (2023); Gabon (2023); Zambia (2023); Angola (2024); Bangladesh (2024); Equatorial Guinea (2024); Maldives (2024); Tajikistan (2024); South Africa (2024)

4	<i>Comprehensive Strategic Partnership</i>	<p>France (2004); Italy (2004); Indonesia (2005); Portugal (2005); Spain (2004); Greece (2006); Denmark (2008); Brazil (2012); Malaysia (2013); Mexico (2013); Peru (2013); Algeria (2014); Argentina (2014); Australia (2014); Egypt (2014); Germany (2014); Mongolia (2014); New Zealand (2014); Saudi Arabia (2014); Great Britain (2015); Chile (2016); Ecuador (2016); Iran (2016); Poland (2016); Serbia (2016); Fiji (2018); Kyrgyzstan (2018); PNG (2018); UAE (2018); Kazakhstan (2019); Solomon Islands (2023); Timor-Leste (2023); Turkmenistan (2023); Bahrain (2024); Djibouti (2024); Micronesia (2024); Azerbaijan (2025)</p>
5	<i>Strategic Cooperative Partnership</i>	<p>India (2005); South Korea (2008); Turkey (2010); Afghanistan (2012); Sri Lanka (2013); Brunei (2018); Nepal (2019); Suriname (2019)</p>

6	<i>Strategic Partnership</i>	Canada (2005); Nigeria (2005); Ukraine (2011); Ireland (2012); Qatar (2014); Costa Rica (2015); Jordan (2015); Sudan (2015); Czech (2016); Morocco (2016); Switzerland (2016); Uruguay (2016); Austria (2018); Bolivia (2018); Bulgaria (2019); Jamaica (2019); Cyprus (2021); Colombia (2023); Palestine (2023); Syria (2023); Guinea-Bissau (2024); Slovakia (2024); Tunisia (2024)
7	<i>Cooperative comprehensive partnership</i>	Croatia (2005); Belgium (2014); Netherlands (2014); Romania (2014); Liberia (2015); Madagascar (2017); Sao Tome and Principe (2017); Uganda (2019); Finland (2013); Israel (2017); Singapore (2023)

Sumber: (Zhang, 2025)

Dalam buku ini, para penulis menguraikan bagaimana hubungan bilateral terjalin antara Tiongkok dengan beberapa negara baik di kawasan Asia dan kawasan Pasifik. Adanya beberapa pandangan berbeda mengenai negara mana saja yang termasuk pada kawasan Asia-Pasifik mendorong kami untuk mengambil jalan tengah dengan mengambil beberapa studi kasus hubungan bilateral Tiongkok dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia dan kawasan Pasifik yang menarik untuk dikaji dari beberapa aspek. Pembahasan mencakup hubungan bilateral Tiongkok dengan Indonesia, Malaysia,

negara-negara muslim Asia Selatan yaitu Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa, Jepang, Timor Leste, Australia dan negara Kepulauan Pasifik diantaranya Kepulauan Solomon dan Fiji.

Dalam membangun beragam kemitraan strategis dan menjalankan diplomasi dengan negara-negara tersebut, Tiongkok menggunakan beragam instrumen *soft power* yang dapat memunculkan saling ketergantungan (*interdependence*) atau bahkan ketergantungan dari pihak mitra kepada Tiongkok. Bentuk kemitraan yang ditawarkan Tiongkok, tanggapan oleh mitranya serta dampak hubungan bilateral, diuraikan dalam pembahasan tiap-tiap bab.

Pada Bab 2 dibahas mengenai sejarah kerja sama ekonomi dan politik Tiongkok dan Indonesia yang telah terjalin sejak lama karena didasari oleh kepentingan bersama. Meskipun terlihat jelas Indonesia adalah sasaran strategis bagi Tiongkok dalam konteks proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), namun Indonesia pun memiliki tujuan meraih investasi Tiongkok untuk mendukung infrastruktur dan meningkatkan daya saing global. Kerja sama bilateral tidak hanya melibatkan aktor negara namun juga aktor non negara seperti perusahaan-perusahaan baik dari Tiongkok maupun Indonesia, sehingga semakin memberikan dinamika terhadap hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara tidak hanya dapat dilihat dari konteks mengejar kepentingan ekonomi tetapi dapat juga dilihat sebagai proses sosial dan kontruksi makna yang berkembang.

Bab 3 menguraikan salah satu penerapan strategi diplomasi Tiongkok melalui *soft power* yang dimilikinya yaitu diplomasi olahraga. Bab ini membahas bahwa pertandingan olahraga bukan saja sekedar perwujudan unjuk kekuatan fisik atletnya tetapi suatu instrumen politik yang tidak luput digunakan oleh pemerintah Tiongkok. Pencapaian prestasi olahraga mampu menunjukkan kepada Barat bahwa Tiongkok atau tepatnya “*One China*” adalah negara yang kuat. Baik Tiongkok maupun Indonesia, keduanya sama-sama

meyakini bahwa olahraga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan citra positif negara di dunia internasional. Kerjasama yang terjalin dapat mendukung kepentingan tersebut. Kedua negara saling mendukung bukan saja dalam hal peningkatan profesionalisme atlet dan industri olahraga tetapi juga penyelenggaraan perhelatan olahraga skala internasional yang secara tidak langsung dapat pula mendukung kemajuan ekonomi melalui pariwisata.

Bentuk lain pengaruh Tiongkok dalam hubungan bilateral terlihat dalam pengembangan konektivitas digital Tiongkok di Indonesia yang dibahas pada Bab 4. Uraian dalam Bab tersebut diantaranya mengenai bagaimana Tiongkok mengubah keunggulan teknologi menjadi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan. Diantaranya adalah program pengembangan teknologi yang didukung beberapa kebijakan seperti *Dual Circulation*, *Made in China 2025* dan *Dokumen 79 2022* yang menetapkan target untuk tidak bergantung kepada teknologi barat, khususnya pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kerja sama Indonesia dan Tiongkok melalui Jalur Sutra Digital (*Digital Silk Road* atau DSR) dapat dilihat sebagai upaya Tiongkok memperkuat pengaruhnya serta sebagai peluang bagi Indonesia untuk melakukan modernisasi sistem komunikasi dan jaringan digital agar lebih efisien dan terintegrasi. Namun, tentu tidak mudah mewujudkan program DSR tersebut karena perlu dilakukan sinkronisasi dengan sektor swasta.

Selain Indonesia, negara di Asia Tenggara yang juga menarik bagi Tiongkok adalah Malaysia. Pembahasan mengenai hubungan bilateral Tiongkok dengan Malaysia diuraikan pada Bab 5 buku ini. Tiongkok memandang Malaysia sebagai negara yang strategis dalam pengembangan kerja sama. *Malaka Gateway* dan *East Coast Rail Link* (ECRL) merupakan pengembangan pelabuhan di Kuantan dan Melaka sebagai bentuk kolaborasi kedua negara di bidang

energi, manufaktur dan teknologi. Kedua proyek strategis ini telah berhasil menjadi simbol kerja sama ekonomi dan integrasi regional antara Tiongkok dan Malaysia. Hubungan keduanya tidak saja menghasilkan kerja sama ekonomi biasa tetapi merupakan bagian dari strategi Tiongkok dalam menerapkan pengaruhnya di kawasan.

Tidak hanya dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, Tiongkok menjalin hubungan baik pula dengan negara-negara muslim di Asia terutama melalui diplomasi budaya. Bab 6 menguraikan peningkatan hubungan bilateral Tiongkok dengan negara-negara Muslim di Asia Selatan, yaitu Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa. Bab ini menyimpulkan bahwa kerja sama yang terjadi antara negara-negara tersebut bukan hanya bersifat transaksional, tetapi juga sarat dengan dimensi simbolik dan politis yang kompleks. Selain itu, kerja sama bilateral Tiongkok dengan negara-negara tersebut bukan sekedar mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga merupakan strategi Tiongkok menghadapi pengaruh India dan AS di Asia Selatan. Selain kemitraan strategis yang dibangun melalui proyek BRI, Tiongkok juga melakukan diplomasi sosial budaya. Diplomasi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan promosi seni dan bahasa melalui penyelenggaraan festival kebudayaan, pertukaran pelajar dan pelatihan guru. Kegiatan ini juga melibatkan Lembaga *Confucius Institute*. Tiongkok juga menyentuh aspek keagamaan dan simbolisme budaya lokal sambil secara berimbang memperhatikan sensitivitas keagamaan. Namun tak pelak, isu Uighur cukup menjadi pertimbangan apabila tidak mengatakannya sebagai penghambat bagi diplomasi budaya dan *soft power* Tiongkok.

Pada Bab 7, diuraikan bagaimana Tiongkok membangun hubungan bilateral yang harmonis dengan negara yang maju di kawasan dan pernah berperang dengannya yaitu Jepang. Arah hubungan bilateral antara dua negara bertetangga dari kawasan

Asia Timur tersebut terwujud dengan baik bahkan dapat terlihat dalam Program yang dinamakan *Made in China 2025*. Bab ini menguraikan adanya transformasi signifikan dari antagonisme historis menuju pragmatisme strategis. Hubungan ditandai dengan kerja sama pertukaran pengetahuan teknis dalam transfer teknologi. Program Tiongkok bernama *Made in China 2025* yang terinspirasi dari Industri 4.0 Jerman, telah memainkan perang penting bagi hubungan bilateral Tiongkok dan Jepang. Program tersebut menjadi katalisator bagi pendalaman kerja sama teknologi antara Tiongkok dan Jepang. Dalam hal ini, Jepang memanfaatkan peluang ekspor barang bernilai tinggi dan bersama dengan Tiongkok berupaya menghadapi tantangan persaingan industri jangka panjang.

Pembahasan buku ini juga mencakup hubungan bilateral Tiongkok dalam aspek ekonomi politik, dan keamanan dengan negara yang tergolong kecil dan berpendapatan rendah yaitu Timor Leste. Bab 8 dalam buku ini menguraikan pengaruh Tiongkok serta ketergantungan (*interdependence*) Timor Leste kepada Tiongkok yang cukup besar terutama melalui bantuan ekonomi. Salah satu proyek yang menunjukkan komitmen ekonomi Tiongkok adalah Pembangunan Pelabuhan Tibar Bay. Pelabuhan ini dibangun dan juga dioperasikan oleh *Tiongkok Harbour Engineering Company*. Tiongkok membantu Timor Leste untuk memhuka potensi ekonomi melalui proyek yang merupakan investasi infrastruktur terbesar yang ada dalam sejarah Timor-Leste. Meski hubungan keduanya terlihat asimetris tetapi Tiongkok pandai berdiplomasi dengan menganggap Timor Leste sebagai seorang teman baik (*a good friend*). Peningkatan hubungan terlihat dari berubahnya status kemitraan yang awalnya pada *level* kemitraan strategis (*strategic partnership*) kemudian meningkat ke *level* yang lebih tinggi yakni kemitraan strategis komprehensif (*Comprehensive Strategic Partnership*).

Namun, hubungan bilateral Tiongkok dengan negara lain juga dapat menciptakan kompleksitas ketika Tiongkok dianggap sebagai suatu ancaman, pesaing dalam aspek ekonomi serta apabila terjadi perbedaan pandangan di antara Tiongkok dan mitranya. Bab 9 buku ini mengungkapkan adanya kompleksitas hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Australia dan juga beberapa negara di Kepulauan Pasifik. Cukup sulit untuk menyimpulkan dengan tegas apakah hubungan yang terjadi antara Tiongkok dan Australia adalah sebagai mitra dan atau sebagai pesaing. Kedua negara menjalani hubungan yang sangat dinamis sebagai teman dan pada saat yang sama juga sebagai rival yang saling mencurigai. Hal ini dapat terjadi karena Australia berada dalam bayang-bayang AS, sekutu terdekat Australia dan sekaligus pesaing utama Tiongkok. Salah satu kebijakan Pemerintah Australia yang sempat menciptakan ketegangan dengan Tiongkok yaitu ketika Australia mengeluarkan regulasi terkait *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat mengatur pembatasan investasi dari Tiongkok.

Kompleksitas dalam dinamika hubungan bilateral Tiongkok juga diuraikan dalam Bab 9 buku ini akibat adanya pengaruh Tiongkok pada negara-negara Kepulauan Pasifik yang juga terpolarisasi oleh pengaruh Tiongkok dan AS. Hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik memang tampak sulit dilepaskan dari pengaruh politik antara negara besar (*great power politics*). Selain itu, kompleksitas hubungan juga dapat terlihat dalam bagaimana Australia memandang Tiongkok sebagai pesaing sebab Tiongkok dan Australia sama-sama secara langsung memperebutkan pengaruh di Kepulauan tersebut. Salah satu contoh kompleksitas dalam konteks ini adalah saat keretakan hubungan antara Fiji dengan Australia dan Selandia Baru tengah terjadi, Tiongkok dan AS lah yang meningkatkan pengaruhnya kepada Fiji. Intensitas kompleksitas pun meningkat ketika perpecahan pandangan di antara negara-

negara Kepulauan Pasifik terjadi akibat kebijakan Tiongkok. Salah satu contoh polarisasi yang pernah terjadi adalah ketika Tiongkok menawarkan inisiatif pendirian pakta pertahanan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Dua belas negara di Kepulauan menolak proyek Tiongkok tersebut dan hanya Kepulauan Solomon yang menerima tawaran Tiongkok. Dengan demikian, upaya penyebaran pengaruh Tiongkok mendapat tantangan bukan saja dari Australia tapi juga dari negara-negara Kepulauan Pasifik. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan negara-negara di Kepulauan Pasifik akan semakin besar dengan semakin luas dan semakin dalamnya kerjasama yang dijalin oleh Tiongkok.

Pengaruh Tiongkok dalam hubungan bilateral dengan negara-negara yang dibahas pada buku ini sebenarnya tidak saja dapat dilihat dalam konteks kerja sama bilateral tetapi juga dalam konteks Perang Dagang AS-Tiongkok. Perang dagang mengemuka kembali setelah pada pemilu 2024, Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS untuk kedua kalinya. Kebijakan penerapan tarif yang tinggi oleh Trump terhadap produk-produk negara lain termasuk negara-negara mitra kerja sama Tiongkok, tentu memberikan pengaruh kepada hubungan bilateral khususnya dalam aspek ekonomi antara Tiongkok dengan negara-negara mitranya. Penetapan tarif yang ditujukan Trump kepada Tiongkok adalah sebesar 145% dan kepada Indonesia pada awalnya sebesar 47% kemudian berubah menjadi 32% hingga pada Juli 2025 ditetapkan hanya 10% setelah negosiasi dilakukan dan menimbulkan perdebatan di dalam negeri. Penetapan tarif impor yang besar kepada negara-negara mitra Tiongkok seperti Malaysia yang terkena tarif sebesar 24% oleh AS, tentu mempengaruhi alur perdagangan dan juga menimbulkan ketidakpastian dalam iklim investasi dan ekspor Malaysia.

Negara maju seperti Jepang hingga negara kecil di Kepulauan Pasifik serta negara berpendapatan rendah seperti Timor Leste pun

tidak luput dari dampak perang dagang AS-Tiongkok. Bahkan Australia, sekutu AS pun terkena pemberlakuan tarif sebesar 10%. Kenaikan biaya impor produk dari AS mengakibatkan inflasi terjadi dan berpotensi memperlambat perekonomian Jepang. Terkait dengan perang dagang, kebijakan Trump lainnya adalah membubarkan lembaga donor yang berdampak besar bagi LSM di Timor-Leste. Beberapa LSM di negara tersebut mengandalkan biaya operasional dari bantuan AS. Kekhawatiran mengenai pembekuan bantuan AS juga dirasakan oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik. Pembahasan bab dalam buku ini pun menguraikan bahwa perang dagang AS-Tiongkok tidak saja mengenai beban tarif dan kendala pasar tetapi juga mempengaruhi arah aliansi strategi pembangunan, dan dinamika ideologi seperti yang mengemuka di Pakistan, Bangladesh dan Maladewa.

Dinamika hubungan bilateral Tiongkok dengan negara-negara yang dibahas dalam bab buku ini merupakan sedikit gambaran dari pengaruh strategi, kebijakan luar negeri dan diplomasi Tiongkok dengan negara-negara mitra tersebut. Dampak yang mengemuka dari dinamika tersebut tidak saja berpengaruh terhadap kestabilan hubungan kedua negara tetapi juga kestabilan kawasan Asia dan kawasan Pasifik serta sistem internasional secara keseluruhan. \*\*\*

## Daftar Pustaka

- Korolev, Alexander. (2019). On Strategic Partnership: What is Strategic about Strategic Partnerships? *Internatinal Politics*, 56(4), 551–566. <https://doi.org/10.1057/s41311-018-0163-z>
- Wilkins, Thomas. (2012). “Alignment”, not “Alliance” - The Shifting Paradigm of International Security Cooperation: Toward A Conceptual Taxonomy of Alignment. *Review of International Studies*, 38(1), 53–76.
- Zhang, Ketian. (2025). Alliances with Chinese characteristics? The contents and rationale of China’s strategic partnerships. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-025-00701-0>